



## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL: MENUMBUHKAN KEPEDULIAN SOSIAL DI TENGAH TRANSFORMASI TEKNOLOGI

Galang Novian Ramadhan <sup>1\*</sup>, Rauda Renwarin <sup>2</sup>, Venny Ceacilia Antasia Sembiring <sup>3</sup>, Aqilah A Gustian <sup>4</sup>, Riska Puspita Sari <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: [galangnovian3@gmail.com](mailto:galangnovian3@gmail.com)\*

### Article Info

#### Article history:

Received : 01 Oktober 2026

Acceptance : 20 Oktober 2026

Published : 20 Oktober 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

#### Cara mengutip:

Ramadhan, N. G., Renwarin, R., Sembiring, A. C. V., Gustian, A. A., Sari, P. R. (2026). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL: MENUMBUHKAN KEPEDULIAN SOSIAL DI TENGAH TRANSFORMASI TEKNOLOGI. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 221-233.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRAK

*Transformasi digital mengubah cara generasi muda mengakses informasi, berinteraksi, dan berpartisipasi sebagai warga negara, tetapi kecakapan teknologi tidak otomatis menghasilkan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membangun kepedulian sosial serta merumuskan hubungan konseptual antara literasi digital dan partisipasi kewarganegaraan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian mengkaji artikel ilmiah, buku, laporan, dan dokumen kelembagaan terkait literasi digital, kewarganegaraan digital, empati, serta tanggung jawab sosial. Data dianalisis secara tematik melalui identifikasi, perbandingan, interpretasi, dan sintesis konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital perlu melampaui keterampilan teknis dengan mengembangkan kesadaran kritis, empati, solidaritas, dan partisipasi sosial. Penelitian ini menawarkan konsep digital social caring sebagai kerangka pedagogis yang mengintegrasikan literasi digital, kewarganegaraan digital, kepedulian sosial, dan tindakan kewarganegaraan. Karena itu, pembelajaran PKn perlu dirancang secara partisipatif, reflektif, dan berbasis masalah nyata agar teknologi menjadi sarana pembentukan warga negara yang kritis, etis, bertanggung jawab, serta aktif merespons persoalan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Transformasi Digital, Literasi Digital, Digital Citizenship, Kepedulian Sosial, Civic Engagement.

## 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara generasi muda memperoleh informasi, berkomunikasi, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Media sosial, platform digital, dan berbagai aplikasi komunikasi tidak lagi sekadar menjadi perangkat teknologi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial tempat generasi muda membangun identitas, bertukar gagasan, merespons persoalan publik, dan membentuk jejaring sosial-kewarganegaraan. UNESCO (2024) menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital memperluas akses terhadap informasi dan membuka peluang baru bagi ekspresi, kolaborasi, serta partisipasi sosial, tetapi juga menghadirkan risiko berupa misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan kekerasan daring. Kondisi ini semakin penting karena sebagian besar generasi muda telah terintegrasi dalam ekosistem digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan lingkungan sosial tempat pengalaman kewarganegaraan generasi muda dibentuk (UNESCO, 2024; OECD, 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ruang sosial dan budaya tempat peserta didik belajar serta membangun orientasi kewarganegaraannya. PKn idealnya tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan mengenai negara, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membangun disposisi yang mendorong peserta didik memiliki tanggung jawab sosial, menghargai keberagaman, memahami persoalan publik, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut menjadi penting karena bentuk partisipasi generasi muda juga mengalami pergeseran menuju ruang digital. OECD (2025) menunjukkan bahwa pola keterlibatan kewarganegaraan generasi muda semakin beragam, termasuk melalui bentuk-bentuk partisipasi daring. Sejalan dengan itu, Peart et al. (2022) menegaskan bahwa keterampilan digital dan sosial-kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk partisipasi anak muda dan digital citizenship. Oleh sebab itu, PKn di era digital perlu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan teknologi bukan hanya secara kompeten, tetapi juga secara bertanggung jawab bagi kehidupan sosial.

Keterhubungan digital tidak secara otomatis menghasilkan kepedulian sosial. Tingginya intensitas penggunaan media sosial, akses terhadap informasi, dan kemampuan menggunakan berbagai platform digital belum tentu diikuti oleh empati, solidaritas, partisipasi, dan tindakan kewarganegaraan. Moon dan Bai (2020) menemukan bahwa komponen literasi digital berupa kemampuan menggunakan informasi, berkomunikasi, dan menciptakan konten lebih berkaitan dengan civic engagement dibandingkan sekadar keterampilan teknis menggunakan teknologi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digital access is not equivalent to civic engagement. Hal yang sama ditunjukkan oleh Bowyer dan Kahne (2020), bahwa pengalaman pembelajaran yang memungkinkan peserta didik membuat dan membagikan media digital mengenai persoalan masyarakat berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik daring, sedangkan kemampuan mengevaluasi kredibilitas informasi berkaitan dengan keterlibatan kewarganegaraan

luring. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi apakah peserta didik menggunakan teknologi, tetapi bagaimana pengalaman digital tersebut dikonstruksi menjadi pengalaman kewarganegaraan yang bermakna (Moon & Bai, 2020; Bowyer & Kahne, 2020; Peart et al., 2022).

Persoalan tersebut memperoleh relevansi yang lebih kuat karena ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan politik generasi muda. Ida et al. (2020) menemukan adanya hubungan antara penggunaan media sosial, pembelajaran politik, partisipasi politik, dan political efficacy generasi muda dalam konteks Indonesia dan Pakistan. Saud et al. (2023) juga menunjukkan bahwa budaya digital generasi muda berkaitan dengan perkembangan jejaring demokrasi, civic engagement, dan partisipasi politik dalam ruang virtual. Sementara itu, Ridha dan Riwanda (2020) menunjukkan bahwa literasi media dan literasi politik berkontribusi terhadap partisipasi kewarganegaraan pemilih pemula pada era digital. Namun, fakta bahwa media digital mampu meningkatkan akses terhadap informasi dan partisipasi tidak dengan sendirinya menunjukkan terbentuknya kepedulian sosial. Di sinilah muncul persoalan penting: generasi muda dapat aktif dalam ruang digital, tetapi aktivitas tersebut belum tentu bertransformasi menjadi perhatian terhadap persoalan sosial dan tindakan nyata dalam kehidupan bersama (Ida et al., 2020; Saud et al., 2023; Ridha & Riwanda, 2020).

Zhang et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi digital telah mengubah proses pembentukan pemahaman mengenai kewarganegaraan karena pembelajaran tentang isu publik tidak lagi hanya berlangsung melalui sekolah, keluarga, dan kelompok sebaya, tetapi juga melalui media sosial. Ruang digital menyediakan beragam perspektif dan kesempatan partisipasi, tetapi sekaligus dapat menghadirkan kebingungan, konflik perspektif, tekanan sosial, dan kecenderungan menjauh dari politik formal. Dalam kondisi demikian, pendidikan memiliki fungsi penting untuk membantu peserta didik menginterpretasikan informasi, membandingkan perspektif, membangun empati, dan menghubungkan pengalaman digital dengan realitas sosial. Dengan kata lain, tantangan PKn bukan sekadar membawa teknologi ke dalam pembelajaran, tetapi membangun jembatan pedagogis antara pengalaman digital dan kepedulian terhadap kehidupan sosial (Zhang et al., 2022; UNESCO, 2024).

Kepedulian sosial karena itu perlu ditempatkan sebagai salah satu orientasi penting Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. Kepedulian sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui bahwa persoalan sosial sedang terjadi, tetapi mencakup perhatian terhadap kondisi orang lain, empati terhadap kelompok yang terdampak, kesediaan memahami persoalan bersama, serta kemauan untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Dalam lingkungan digital, proses tersebut membutuhkan kemampuan tambahan untuk memverifikasi informasi, mengenali dampak sosial suatu konten, memahami keberagaman perspektif, dan menggunakan teknologi secara etis. UNESCO (2024) menempatkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menciptakan, menggunakan, dan membagikan informasi secara kritis sebagai bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan di era digital. Sementara itu, OECD (2025) menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun kapasitas generasi muda agar mampu terlibat secara bermakna dalam kehidupan demokratis dan sosial. Dengan demikian, kepedulian

sosial dapat diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan digital competence dengan civic engagement (UNESCO, 2024; OECD, 2025).

Meskipun kajian mengenai digital citizenship, literasi digital, dan partisipasi kewarganegaraan berkembang cukup pesat, masih terdapat ruang konseptual yang perlu diperkuat. Banyak penelitian lebih menekankan keamanan daring, literasi informasi, etika digital, online participation, political efficacy, atau inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Jones et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa pendidikan digital citizenship dapat meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan daring dan self-efficacy, tetapi dampaknya tidak secara seragam muncul pada aspek online civility, cyberbullying, privasi, dan komunikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan digital belum otomatis menghasilkan perubahan perilaku sosial. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara being digitally competent dan being socially caring. Penelitian tentang digital citizenship perlu diperluas dari pertanyaan mengenai bagaimana peserta didik menjadi pengguna teknologi yang aman dan bertanggung jawab menuju pertanyaan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kepedulian, solidaritas, dan tindakan kewarganegaraan (Jones et al., 2024; Peart et al., 2022; Römer, 2024).

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada belum kuatnya integrasi antara Pendidikan Kewarganegaraan, transformasi digital, dan kepedulian sosial dalam satu kerangka konseptual. Penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan antara media digital dengan literasi politik, civic engagement, political efficacy, dan digital citizenship, tetapi dimensi kepedulian sosial sebagai penghubung antara kompetensi digital dan tindakan kewarganegaraan masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Padahal, kepedulian sosial memiliki posisi strategis karena memungkinkan individu bergerak dari sekadar mengetahui persoalan menuju kesediaan untuk memperhatikan, memahami, dan merespons persoalan tersebut. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya “seberapa digital” peserta didik, tetapi juga “seberapa sosial dan kewarganegaraan” penggunaan teknologi tersebut (Ida et al., 2020; Moon & Bai, 2020; Saud et al., 2023).

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty melalui pengembangan perspektif digital social caring dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep ini dipahami sebagai orientasi pedagogis yang mengarahkan penggunaan teknologi digital untuk membangun kesadaran sosial, empati, solidaritas, tanggung jawab, dan keterlibatan kewarganegaraan. Perspektif tersebut memperluas pemaknaan digital citizenship yang selama ini banyak berorientasi pada penggunaan teknologi secara aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab, menuju kemampuan menghubungkan pengalaman digital dengan persoalan sosial dan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, teknologi bukan ditempatkan sebagai tujuan pembelajaran, melainkan sebagai medium pembentukan warga negara yang peduli. Gagasan tersebut sejalan dengan UNESCO (2024) yang menekankan keterkaitan antara kompetensi digital, partisipasi, etika, dan kontribusi sosial, serta dengan temuan Bowyer dan Kahne (2020) bahwa pengalaman belajar digital tertentu dapat berkaitan dengan keterlibatan kewarganegaraan baik dalam ruang daring maupun luring.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan di era digital dalam menumbuhkan kepedulian sosial di tengah transformasi teknologi. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perubahan karakteristik pembelajaran kewarganegaraan dalam lingkungan digital, mengidentifikasi bentuk kepedulian sosial yang berkembang melalui pengalaman kewarganegaraan digital, mengkaji faktor pedagogis yang mendukung atau menghambat transformasi kompetensi digital menjadi kepedulian sosial, serta merumuskan konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan literasi digital, nilai kewarganegaraan, kepedulian sosial, dan civic engagement. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus Pendidikan Kewarganegaraan dari orientasi adaptasi teknologi menuju transformasi teknologi yang berorientasi pada kepedulian sosial dan kehidupan kewarganegaraan yang bermakna.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami dan menginterpretasikan berbagai gagasan, konsep, temuan empiris, serta argumentasi akademik mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, transformasi teknologi digital, digital citizenship, dan kepedulian sosial. Studi pustaka digunakan sebagai metode penelitian dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, membaca secara kritis, membandingkan, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Literatur review dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila proses pengumpulan dan sintesis literatur dilakukan secara terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar sebagai rangkuman penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen lembaga yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki keterkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau civic education; (2) membahas transformasi digital, digital citizenship, literasi digital, atau partisipasi kewarganegaraan; (3) memberikan pembahasan mengenai kepedulian sosial, civic engagement, empati, solidaritas, atau tanggung jawab sosial; dan (4) dipublikasikan terutama dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh gambaran perkembangan kajian yang mutakhir. Literatur klasik tetap digunakan secara terbatas apabila diperlukan untuk memperkuat landasan konseptual penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Transformasi Digital dan Pergeseran Ruang Pembentukan Kewarganegaraan**

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa transformasi digital telah menghasilkan perubahan mendasar pada ruang tempat kewarganegaraan dipelajari, dipraktikkan, dan dinegosiasikan. Kewarganegaraan yang sebelumnya banyak dibentuk melalui institusi formal seperti sekolah, keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga politik kini juga

berlangsung melalui media sosial, platform digital, komunitas daring, serta berbagai bentuk interaksi berbasis teknologi. Fajri et al. (2022), melalui telaah terhadap 41 artikel yang terindeks Scopus, menunjukkan bahwa digital citizenship dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan semakin dikaitkan dengan partisipasi politik, partisipasi demokratis, keterlibatan warga negara, dan praktik kewarganegaraan pada era digital. Dengan demikian, ruang digital tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai instrumen pembelajaran, tetapi telah menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat pengalaman kewarganegaraan terbentuk.

Temuan tersebut diperkuat oleh Tarsidi et al. yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan civic engagement generasi digital di Indonesia. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi medium bagi generasi muda untuk memperoleh informasi, berinteraksi dengan persoalan sosial, dan terlibat dalam aktivitas kewarganegaraan. Penelitian terbaru mengenai generasi Z di Indonesia juga memperlihatkan bahwa media sosial semakin diposisikan sebagai sarana untuk memperluas partisipasi politik generasi muda. Artinya, transformasi digital telah menggeser batas antara ruang pendidikan, ruang sosial, dan ruang kewarganegaraan. Namun, temuan tersebut perlu dibaca secara kritis. Hubungan antara penggunaan media sosial dan civic engagement tidak berarti bahwa media sosial secara otomatis menghasilkan warga negara yang lebih aktif. Media sosial menyediakan peluang untuk berpartisipasi, tetapi karakter partisipasi yang muncul sangat bergantung pada kualitas informasi, pola interaksi, konteks sosial, dan kapasitas kritis pengguna. Dengan kata lain, akses terhadap ruang kewarganegaraan digital tidak identik dengan kualitas pengalaman kewarganegaraan. Hal ini menjadi penting karena ruang digital memiliki karakter algoritmik yang memungkinkan pengguna menerima informasi yang sesuai dengan preferensi sebelumnya. Akibatnya, ruang yang seharusnya memperluas perspektif dapat pula mempersempit pengalaman sosial apabila tidak disertai kemampuan kritis.

Temuan systematic review terbaru mengenai digital citizenship bahkan menunjukkan bahwa implementasi digital citizenship di pendidikan masih menghadapi persoalan. Tadlaoui-Brahmi et al. (2022) menemukan bahwa digital citizenship sering digunakan sebagai istilah payung untuk berbagai aktivitas pembelajaran berbasis teknologi, tetapi belum selalu mendorong peserta didik untuk mempraktikkan kewarganegaraan digital secara kritis. Bahkan, lingkungan dan perangkat digital sering diterima begitu saja tanpa dipertanyakan secara kritis. Kritik tersebut sangat relevan bagi PKn karena pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak hanya mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga mengajarkan bagaimana memahami struktur sosial, kepentingan, kekuasaan, dan konsekuensi sosial yang melekat pada penggunaan teknologi.

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa transformasi digital telah menghasilkan pergeseran ruang kewarganegaraan, tetapi belum otomatis menghasilkan transformasi kualitas kewarganegaraan. Perubahan pertama bersifat struktural, yaitu munculnya ruang digital sebagai ruang partisipasi. Perubahan kedua bersifat pedagogis, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas peserta didik agar mampu memahami dan menggunakan ruang tersebut secara kritis. Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis: bukan sekadar memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran,

tetapi membantu peserta didik memahami teknologi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kewarganegaraan.

### **Literasi Digital: Dari Kemampuan Teknis menuju Kompetensi Kewarganegaraan**

Tema kedua yang muncul dari sintesis literatur adalah bahwa literasi digital tidak dapat lagi dipahami sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi. Dalam konteks kewarganegaraan, literasi digital mencakup kemampuan menemukan, mengevaluasi, memahami, memproduksi, dan mendistribusikan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Hubungan antara literasi digital dan civic engagement telah banyak ditunjukkan dalam penelitian terdahulu, tetapi hubungan tersebut bersifat multidimensional. Artinya, tidak semua bentuk literasi digital menghasilkan bentuk keterlibatan kewarganegaraan yang sama.

Moon dan Bai (2020), misalnya, menunjukkan bahwa aspek literasi digital yang berkaitan dengan penggunaan informasi, komunikasi, dan produksi konten lebih berhubungan dengan civic engagement dibandingkan keterampilan teknis semata. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa *the quality of digital literacy matters more than the mere possession of digital skills*. Peserta didik yang mampu menggunakan aplikasi secara teknis belum tentu mampu menilai kredibilitas informasi, memahami kepentingan di balik suatu konten, atau mempertimbangkan dampak sosial dari tindakannya.

Temuan tersebut memperoleh penguatan dari penelitian yang lebih baru. Consoli (2024), melalui penelitian terhadap 8.915 siswa sekolah menengah, menemukan bahwa pendekatan pendidikan media yang berbeda berkaitan dengan outcome digital citizenship yang berbeda. Aktivitas media yang bersifat ekspresif berhubungan dengan online civic engagement, sedangkan pendidikan yang berorientasi pada bahaya internet lebih berkaitan dengan perilaku daring yang menghormati orang lain. Temuan ini mengandung implikasi penting: jenis pedagogi digital menentukan jenis kewarganegaraan digital yang berkembang.

Dengan demikian, terdapat kelemahan apabila literasi digital dalam PKN hanya ditempatkan sebagai kemampuan mencari informasi atau menggunakan media pembelajaran. Pendekatan semacam itu berisiko menghasilkan *technologically competent learners* tetapi belum tentu menghasilkan *civically competent citizens*. Literasi digital perlu diperluas menjadi kemampuan untuk mempertanyakan informasi, membandingkan sumber, mengenali bias, memahami konsekuensi sosial, menghargai perspektif berbeda, dan menggunakan informasi sebagai dasar tindakan kewarganegaraan. Hal tersebut juga diperkuat oleh studi tentang pendidikan media yang menunjukkan bahwa transformasi pengetahuan menjadi tindakan merupakan unsur penting dalam pembelajaran literasi media. Penelitian Zou et al. (2024) menunjukkan pentingnya refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif dalam membantu peserta didik mengubah pengetahuan media sosial menjadi tindakan pembelajaran yang lebih bermakna.

Temuan tersebut dapat ditarik lebih jauh dalam konteks PKN: literasi digital seharusnya tidak berhenti pada *knowing*, tetapi bergerak menuju *reflecting*, *caring*, and

acting. Dari perspektif ini, hasil studi pustaka mengindikasikan bahwa literasi digital memiliki sekurang-kurangnya tiga lapisan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, technical literacy, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan platform. Kedua, critical literacy, yaitu kemampuan mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi. Ketiga, civic literacy, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk memahami serta merespons persoalan publik. Lapisan ketiga inilah yang sering kali belum mendapatkan perhatian memadai dalam praktik pendidikan.

### **Digital Citizenship: Antara Perilaku Bertanggung Jawab dan Partisipasi Kewarganegaraan**

Sintesis literatur berikutnya menunjukkan bahwa digital citizenship telah berkembang menjadi salah satu konsep utama dalam membicarakan kewarganegaraan pada era teknologi. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku, berkomunikasi, berpartisipasi, dan menggunakan teknologi secara etis serta bertanggung jawab. Fajri et al. (2022) menunjukkan bahwa praktik digital citizenship dalam pembelajaran PKn mencakup dimensi menghormati, mendidik, dan menghargai praktik kewarganegaraan serta berkaitan dengan partisipasi demokratis dan keterlibatan warga negara. Akan tetapi, studi pustaka juga menunjukkan bahwa konsep digital citizenship memiliki persoalan konseptual. Salah satu persoalan utama adalah kecenderungan untuk mereduksi digital citizenship menjadi perilaku aman dan etis di internet. Padahal, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku sebagai pengguna teknologi, tetapi juga bagaimana individu berkontribusi terhadap kehidupan publik. Tadlaoui-Brahmi et al. (2022) menemukan bahwa implementasi digital citizenship di pendidikan sering kali lebih menekankan aktivitas teknologi daripada praktik kewarganegaraan kritis.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya dua orientasi yang perlu dibedakan. Orientasi pertama adalah protective digital citizenship, yang menekankan keamanan, privasi, etika, dan pencegahan risiko digital. Orientasi kedua adalah participatory digital citizenship, yang menekankan kemampuan menggunakan ruang digital untuk berdialog, menyuarakan kepentingan publik, membangun jejaring, dan melakukan tindakan sosial. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi pendidikan kewarganegaraan akan menjadi kurang lengkap apabila hanya berhenti pada orientasi pertama.

Penelitian Consoli (2024) memberikan dukungan empiris terhadap argumentasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan media yang berorientasi pada ekspresi memiliki hubungan dengan online civic engagement, sementara pendekatan yang berorientasi pada risiko lebih berhubungan dengan perilaku online yang sopan. Artinya, different pedagogical orientations produce different dimensions of digital citizenship. Temuan ini menunjukkan bahwa PKn perlu secara sadar merancang pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik tidak hanya menghindari perilaku negatif, tetapi juga mengembangkan kapasitas positif untuk berpartisipasi. Lebih lanjut, systematic review mengenai civic engagement dalam konteks digital citizenship menunjukkan bahwa civic engagement memiliki dimensi sosial dan politik yang saling berhubungan. Hal ini penting karena konsep kewarganegaraan tidak seharusnya dibatasi pada partisipasi politik formal. Membantu komunitas, menyebarkan

informasi yang bermanfaat, mendukung kelompok rentan, melakukan kampanye sosial, dan berkolaborasi menyelesaikan masalah masyarakat juga merupakan bentuk tindakan kewarganegaraan.

Dengan demikian, hasil sintesis mengarah pada reinterpretasi digital citizenship: dari “how to behave appropriately online” menuju “how to use digital spaces to contribute meaningfully to society.” Pergeseran ini penting karena memberikan ruang bagi Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan dimensi sosial dari kewarganegaraan digital.

### **Kepedulian Sosial sebagai Dimensi yang Masih Kurang Mendapatkan Perhatian**

Tema yang paling penting dari hasil sintesis adalah posisi kepedulian sosial. Literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai PKn digital telah banyak membahas literasi digital, digital citizenship, partisipasi politik, demokrasi, dan civic engagement. Namun, kepedulian sosial belum selalu ditempatkan sebagai mekanisme konseptual yang menjelaskan bagaimana seseorang bergerak dari pengetahuan digital menuju tindakan sosial. Dalam konteks ini, kepedulian sosial dapat dipahami sebagai orientasi yang membuat individu tidak berhenti pada pertanyaan “Apa yang terjadi?”, tetapi bergerak menuju “Mengapa hal tersebut penting bagi orang lain?” dan “Apa yang dapat saya lakukan?”. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dimensi afektif dan moral yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh konsep literasi digital. Literasi menjelaskan kemampuan mengetahui dan mengevaluasi informasi; digital citizenship menjelaskan perilaku dan tanggung jawab digital; sedangkan kepedulian sosial menjelaskan orientasi seseorang terhadap kondisi orang lain dan kepentingan bersama.

Penelitian mengenai generasi muda Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat berkontribusi terhadap civic engagement. Tarsidi et al. menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam keterlibatan kewarganegaraan digital natives Indonesia. Namun, temuan tersebut sekaligus dapat dibaca secara kritis: keterlibatan yang muncul di ruang digital belum tentu selalu bertransformasi menjadi tindakan sosial di ruang kehidupan nyata. Dengan demikian, terdapat kemungkinan adanya participation gap, yaitu kesenjangan antara aktivitas digital dan tindakan sosial yang memiliki konsekuensi nyata.

Kesenjangan tersebut juga dapat dijelaskan melalui temuan systematic review mengenai pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan politik. Studi terhadap controlled trials menunjukkan bahwa metode partisipatif, pendekatan seluruh sekolah, dan pengembangan kapasitas guru merupakan unsur penting dalam pendidikan kewarganegaraan, sementara pengetahuan semata atau keterlibatan daring tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku. Temuan ini sangat relevan dengan argumentasi penelitian karena menunjukkan bahwa information does not automatically become action. Oleh karena itu, kepedulian sosial dapat ditempatkan sebagai mekanisme penghubung antara pengetahuan dan tindakan. Prosesnya dapat dirumuskan: Digital Information → Social Awareness → Empathy → Social Caring → Civic Engagement → Civic Action. Rangkaian tersebut merupakan sintesis konseptual penelitian. Ia menunjukkan bahwa informasi digital merupakan titik awal, bukan titik akhir. Informasi

perlu diinterpretasikan melalui kesadaran sosial; kesadaran perlu berkembang menjadi empati; empati perlu berkembang menjadi kepedulian; dan kepedulian kemudian dapat mendorong keterlibatan serta tindakan kewarganegaraan.

Berdasarkan keseluruhan kajian, ditemukan bahwa literatur terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara teknologi, literasi digital, digital citizenship, dan civic engagement. Akan tetapi, keempat konsep tersebut masih sering dibahas secara parsial. Studi tentang digital citizenship lebih banyak membahas perilaku bertanggung jawab; studi literasi digital menekankan kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi; sementara studi civic engagement lebih banyak melihat bentuk partisipasi. Yang masih membutuhkan elaborasi adalah mekanisme yang menghubungkan ketiga kapasitas tersebut dengan orientasi kepedulian terhadap kehidupan sosial. Di sinilah penelitian ini menawarkan konsep digital social caring. Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan digital citizenship, melainkan memperluas orientasinya. Jika digital citizenship menjawab pertanyaan “bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab di ruang digital?”, maka digital social caring menambahkan pertanyaan “untuk siapa dan untuk kepentingan sosial apa teknologi tersebut digunakan?”

Konsep tersebut dapat dirumuskan melalui lima dimensi. Pertama, digital social awareness, yaitu kemampuan mengenali persoalan sosial melalui informasi digital. Kedua, critical empathy, yaitu kemampuan memahami pengalaman kelompok lain secara kritis dan tidak sekadar berdasarkan emosi sesaat. Ketiga, social responsibility, yaitu kesadaran mengenai konsekuensi sosial dari aktivitas digital. Keempat, digital solidarity, yaitu kemampuan menggunakan jejaring digital untuk mendukung kepentingan sosial. Kelima, civic action, yaitu kemampuan menerjemahkan kepedulian menjadi tindakan nyata.

Sintesis ini memperoleh relevansi dari perkembangan riset terbaru. Kajian systematic review tahun 2025 menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital semakin berkembang, tetapi efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kompetensi guru, kesenjangan akses teknologi, dan dukungan sistem pendidikan. Penelitian terhadap guru dan peserta didik Indonesia juga menunjukkan pentingnya kesiapan dan tingkat digital citizenship dalam konteks pendidikan Indonesia. Dengan demikian, pengembangan digital social caring tidak dapat dilepaskan dari ekosistem pendidikan yang mendukung, kompetensi guru, dan kesempatan peserta didik untuk mempraktikkan kewarganegaraan.

#### **4. KESIMPULAN**

Transformasi digital telah memperluas ruang pembentukan kewarganegaraan, tetapi keterhubungan dan kompetensi digital tidak secara otomatis menghasilkan kepedulian sosial maupun tindakan kewarganegaraan. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu bergerak dari orientasi penguasaan teknologi dan digital citizenship menuju pengembangan kompetensi digital yang berorientasi pada kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep digital social caring sebagai perspektif yang menghubungkan literasi digital, kesadaran sosial, empati, solidaritas, civic engagement, dan tindakan kewarganegaraan. Konsep ini

menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan pendidikan, melainkan sebagai medium untuk membangun warga negara yang kritis, etis, peduli, dan aktif dalam merespons persoalan sosial. Oleh karena itu, penguatan PKn di era digital perlu diwujudkan melalui pembelajaran yang partisipatif, reflektif, berbasis persoalan nyata, dan menghubungkan pengalaman digital dengan tindakan sosial. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperluas orientasi digital citizenship dari sekadar penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab menuju kewarganegaraan digital yang berorientasi pada kepedulian dan kepentingan bersama.

## REFERENSI

- Boeskens, L., & Meyer, K. (2025). Policies for the digital transformation of school education: Evidence from the Policy Survey on School Education in the Digital Age. OECD Education Working Papers, 328. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/464dab4d-en>
- Consoli, T. (2024). Different media education approaches predict distinct aspects of digital citizenship. *Frontline Learning Research*, 12(4), 113–137. <https://doi.org/10.14786/flr.v12i4.1555>
- Fajri, I., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2022). Digital citizenship in civic education learning: A systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 833–854. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.755>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Halimi, M., Rahmat, R., Nugraha, R. A., & Pratiwi, E. D. (2022). Young digital citizen answers: Can online learning improve the quality of civic education learning? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 99–109. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40140>
- Jones, L. M., Mitchell, K. J., & Beseler, C. L. (2024). The impact of youth digital citizenship education: Insights from a cluster randomized controlled trial outcome evaluation of the Be Internet Awesome (BIA) curriculum. *Contemporary School Psychology*, 28, 509–523. <https://doi.org/10.1007/s40688-023-00465-5>
- Kaskazi, A., & Kitzie, V. (2021). Engagement at the margins: Investigating how marginalized teens use digital media for political participation. *New Media & Society*, 25(1), 72–94. <https://doi.org/10.1177/14614448211009460>
- Kenna, J. L., & Hensley, B. (2019). Utilizing social media to promote civic engagement in the social studies classroom. *The Social Studies*, 110(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/00377996.2018.1524360>
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1611–1622. <https://doi.org/10.1177/0002764213489015>

- Moon, S. J., & Bai, S. Y. (2020). Components of digital literacy as predictors of youth civic engagement and the role of social media news attention: The case of Korea. *Asian Journal of Communication*, 30(4), 301–318. <https://doi.org/10.1080/17482798.2020.1728700>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), Article e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Oden, A., & Porter, L. (2023). The kids are online: Teen social media use, civic engagement, and affective polarization. *Social Media + Society*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/20563051231186364>
- OECD. (2025). Education policy outlook 2025: Nurturing engaged and resilient lifelong learners in a world of digital transformation. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c3f402ba-en>
- OECD. (2025). Trends shaping education 2025. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ee6587fd-en>
- Ohme, J. (2019). When digital natives enter the electorate: Political social media use among first-time voters and its effects on campaign participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1613279>
- Pathak-Shelat, M., & Bhatia, K. V. (2019). Young people as global citizens: Negotiation of youth civic participation in adult-managed online spaces. *Journal of Youth Studies*, 22(1), 87–107. <https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1483074>
- Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2017). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi media, literasi politik, dan partisipasi kewarganegaraan pemilih pemula di era digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110–121. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>
- Römer, L. (2024). Through media and digital literacy education towards civic participation of disadvantaged youth. In S. Yates & E. Carmi (Eds.), *Digital inclusion*. Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-28930-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-031-28930-9_10)
- Shao, L., Goli, M., Sewagegn, A. A., & Sahu, A. K. (2022). Impact of social media usage on civic engagement towards societal problems: Qualitative modelling approach. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2022, Article 1121215. <https://doi.org/10.1155/2022/1121215>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tadlaoui-Brahmi, A., Çuko, K., & Alvarez, L. (2022). Digital citizenship in primary education: A systematic literature review describing how it is implemented. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), Article 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100348>
- Tangül, H., & Soykan, E. (2021). Comparison of students' and teachers' opinions toward digital citizenship education. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 752059. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.752059>

- Tapingkae, P., Panjaburee, P., Hwang, G.-J., & Srisawasdi, N. (2020). Effects of a formative assessment-based contextual gaming approach on students' digital citizenship behaviours, learning motivations, and perceptions. *Computers & Education*, 159, Article 103998. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103998>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 257–269. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- Tomé, V., Sikharulidze, M., Lobzhanidze, S., & Urchukhishvili, G. (2024). Digital citizenship education: Perceptions on the concept, self-reported competences, and practices of Georgian school society. *Journal of Media Literacy Education*, 16(2), 71–84. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2024-16-2-6>
- UNESCO. (2024). Global citizenship education in a digital age: Teacher guidelines. UNESCO.
- Wilson, S. M., & Anagnostopoulos, D. (2021). Methodological guidance paper: The craft of conducting a qualitative review. *Review of Educational Research*, 91(5), 681–712. <https://doi.org/10.3102/00346543211012755>
- Zhang, W., Chen, Z., Chia, Y. T., & Neoh, J. Y. (2022). Rethinking civic education in the digital era: How media, school, and youth negotiate the meaning of citizenship. *International Communication Gazette*, 84(4), 287–305. <https://doi.org/10.1177/17480485221094101>